

## BAB 1

### PENDAHULUAN

#### 1.1 Latar Belakang

Sebagai makhluk sosial, manusia akan saling berinteraksi satu dengan yang lainnya. Terutama nian, kehidupan sosial berupa aksi, atau interaksi: bila orang berhenti berinteraksi maka masyarakat akan sirna.<sup>1</sup> Relasi timbal balik demikian menjadi dasar terbentuknya bangunan terkecil dari masyarakat. Artinya bahwa relasi tersebut mulai dibangun antar individu. Agar manusia dapat berada dan lestari, mereka bergantung pada sejumlah kelaziman sosial atau akidah tersirat yang mengatur perilaku.<sup>2</sup> Relasi-relasi yang dibangun antar individu tersebut membutuhkan aturan yang mengikat agar tercipta keteraturan. Oleh karena itu, sudah semestinya dalam sebuah kehidupan bermasyarakat ada berbagai aturan dan tata tertib yang dihidupi secara bersama-sama. Aturan dan tata tertib tersebut kemudian menjadi sesuatu yang menyatu bersama masyarakat dan bersifat mengikat. Lama-kelamaan aturan dan tata tertib itu menjadi budaya masyarakat tersebut.

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mendefinisikan budaya sebagai “pikiran; akal budi; adat istiadat; sesuatu mengenai kebudayaan yang sudah berkembang (beradab, maju); sesuatu yang sudah menjadi kebiasaan dan sukar diubah”.<sup>3</sup> Tentunya setiap daerah memiliki kebudayaan yang berbeda dan bervariasi. Kebudayaan tersebut dibangun sejak zaman purbakala, sejak awal di mana manusia mulai dapat saling berinteraksi.

Hampir seluruh wilayah di Kabupaten Sikka memiliki kebudayaan yang tidak jauh berbeda. Masyarakat di Desa Egon Gahar pada khususnya masih memelihara kebudayaannya dengan baik. Salah satunya adalah pembagian kelompok kerja.

---

<sup>1</sup>Thomas Hylland Eriksen, *Antropologi Sosial dan Budaya*, penerj. Yosef Maria Florisan (Maumere: Penerbit Ledalero, 2009), hlm. 81.

<sup>2</sup>*Ibid.*, hlm. 69.

<sup>3</sup>Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ketiga* (Jakarta: Balai Pustaka, 2005), hlm. 169.

Masyarakat Desa Egon Gahar sangat memegang erat budaya pembagian kelompok kerja: kaum lelaki memiliki peran untuk berburu, mencari kayu bakar, membuka lahan dan membangun rumah. Sedangkan kaum perempuan mengemban tugas untuk menyiapkan makanan, menjaga dan mengasuh anak. Singkatnya, perempuan bertugas mengurus pekerjaan di rumah, sedangkan laki-laki mencari nafkah.

Pembagian kerja seperti ini secara tidak langsung menempatkan laki-laki pada posisi yang lebih tinggi dari perempuan sebab laki-laki dianggap lebih kuat karena bertugas mencari nafkah; bekerja keras demi menghidupi semua anggota keluarga. Kenyataan yang demikian membuat orang memiliki pandangan yang sama terhadap kaum perempuan dari setiap masanya. Orang menjadi terbiasa berpikir bahwa kaum perempuan berada pada posisi marginal sedangkan laki-laki mendapat tempat yang utama.

Pemikiran tentang posisi marginal perempuan ini diperkuat lagi dengan kenyataan pemilahan dalam banyak peran di tengah relasi antar masyarakat. Pemilahan dalam banyak peran di tengah relasi antar masyarakat menciptakan status sosial yang berbeda pula. Status sosial merupakan satu segi yang ditentukan secara sosial atas diri seseorang yang pada gilirannya menentukan sebuah relasi sosial yang mencakup hak dan kewajiban tertentu terhadap orang-orang lain.<sup>4</sup> Dengan adanya status sosial yang diemban oleh seseorang dalam membangun relasinya dengan individu lain, tentunya memberi ruang yang terbatas. Menjadi pengemban suatu status sosial tertentu mengarahkan tindakan seseorang seturut cara-cara tertentu.<sup>5</sup> Demikian pula dengan masyarakat terkhusus kaum perempuan yang hidup dalam lingkup budaya patriarkat. Dengan mengemban status sosial sebagai perempuan yang dinomorduakan, perempuan memiliki ruang yang terbatas dalam mengekspresikan hak dan kewajibannya. Dalam budaya ini, perempuan tidak bebas lagi menentukan hidupnya. Perempuan tidak bebas lagi mengontrol tubuhnya. Perempuan tidak bebas lagi dalam memelihara lingkungan hidupnya. Politik, budaya, agama dijadikan sarana

---

<sup>4</sup>Thomas Hylland Eriksen, *op.cit.*, hlm. 83.

<sup>5</sup>*Ibid.*, hlm. 85.

untuk mengontrol perempuan.<sup>6</sup> Pada waktu yang sama terjadilah perampasan hak perempuan dalam pengambilan keputusan.<sup>7</sup>

Selain sistem pembagian kerja, salah satu budaya yang masih dipertahankan oleh masyarakat Sikka pada umumnya dan masyarakat Desa Egon Gahar khususnya ialah budaya perkawinan. Sebelum melihat lebih jauh tentang budaya ini, penulis akan menjelaskan terlebih dahulu pembagian kelompok etnis di Kabupaten Sikka. Secara umum terdapat lima etnis di Kabupaten Sikka yaitu, pertama etnis Sikka Krowe. Etnis ini mendiami di sebagian besar wilayah Kabupaten Sikka meliputi Kecamatan Lela, Kecamatan Nita, Kecamatan Koting, Kecamatan Nele, Kecamatan Kangae, Kecamatan Kewapante, Kecamatan Bola, Kecamatan Hewokloang, Kecamatan Mapitara dan Kecamatan Waigete. Kelompok etnis ini menggunakan bahasa Sikka. Kedua, etnis Lio. Etnis ini mendiami wilayah bagian barat Kabupaten Sikka yang terdiri dari sub etnis Mbengu, Mego, Nualolo dan Bu. Kelompok etnis ini memiliki budaya tersendiri yaitu budaya Lio serta menggunakan bahasa Lio. Ketiga, etnis Muhang-Tana Ai. Etnis ini mendiami wilayah bagian timur Kabupaten Sikka yang meliputi wilayah Kecamatan Talibura dan Kecamatan Waiblama. Etnis ini menggunakan bahasa Muhan. Keempat, etnis Palue. Kelompok ini mendiami wilayah Palue yaitu wilayah Kecamatan Palue dan menggunakan bahasa Palue. Kelima, etnis Tidung Bajo. Kelompok etnis ini berasal dari Sulawesi Selatan yang mendiami pulau-pulau di sekitar Teluk Maumere dan sepanjang Pantai Utara Kabupaten Sikka. Etnis ini menggunakan bahasa Bajo.<sup>8</sup>

Sistem perkawinan di Kabupaten Sikka sudah terbentuk sejak pertengahan abad ke XVII di masa pemerintahan Ratu Dona Maria da Silva di Sikka. Penetapan sistem tersebut dibuat guna menetapkan suatu peraturan yang lebih mengikat yang

---

<sup>6</sup>A. Nunuk P. Murniati, *Gentar Gender; Perempuan Indonesia dalam Perspektif Agama, Budaya dan Keluarga* (Magelang: Indonesia Tera, 2004), hlm. 239.

<sup>7</sup>*Ibid.*, hlm. 80.

<sup>8</sup> Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan Kabupaten Sikka, "Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah Kabupaten Sikka" (Manuskrip, 2018), hlm. 27.

harus dijalankan secara menyeluruh.<sup>9</sup> Latar belakang dari pembentukan sistem ini ialah karena pada masa itu sering terjadi berbagai masalah amoral seperti pemerkosaan, selingkuh dan tindakan kekerasan lainnya. Tindakan-tindakan ini kemudian berdampak pada pudarnya nilai-nilai kemanusiaan yang sudah dihidupi dalam masyarakat sehingga kehidupan masyarakat setempat menjadi tidak harmonis. Sebuah perkawinan harus diikat oleh adat yang berlaku serta direstui oleh seluruh anggota keluarga besar, bukan hanya keluarga inti yakni bapak, mama serta saudara-saudari kandungnya. Karena sebagaimana diketahui sudah sejak awal para leluhur atau nenek moyang dalam satu rumpun keluarga sudah menjalin kerja sama dengan saling memberi belis dalam suatu perkawinan. Dalam perkawinan selalu terjadi persatuan atau pertemuan keluarga jauh dan dekat serta kenalan. Rasa solidaritas semakin terpupuk. Sebelum adanya perkawinan gereja sudah ada perkawinan adat yaitu dengan persetujuan atau restu dari keluarga inti kedua insan, sehingga keduanya dapat mulai *laba lepo, sorong woga* yang berarti membangun keluarga baru.<sup>10</sup>

Dalam sistem adat istiadat Sikka Krowe di Kabupaten Sikka, perkawinan yang sesungguhnya harus melewati tahapan-tahapan yang sudah diatur oleh hukum adat. Tahapan-tahapan tersebut yakni masa pertunangan dan masa perkawinan. Tahap pertama adalah masa pertunangan. Masa ini terdiri atas tujuh tahap. Pertama, *Briu Mikut* yang berarti perkenalan antara pemuda dengan gadis pada pandangan pertama. Kedua, *Diri Miping* artinya melihat dalam mimpi. Ketiga, *Kula Babong* penafsiran atas mimpi yang disampaikan oleh pemuda kepada orangtuanya. Keempat, *Pano Ahu (Ahu Wating)* ialah tahap di mana *A'a Gete* akan mencari kesempatan yang baik seakan-akan bertandang ke rumah si gadis. Kelima, *Wua-Ta'a 'Oko-Kape* ialah bisikan si gadis kepada *A'a Gete* memberikan kepastian bahwa ia tidak ragu lagi dengan jawabannya. Keenam, *Prage Wae – Ara Mata* yaitu tahapan peresmian pertunangan. Ketujuh, *Wua Ta'a Wa Gete* disebut juga *Kila Jarang* atau *Seneng Bura Kirek* yaitu pemberian imbalan dari pihak keluarga laki-laki kepada pihak keluarga perempuan.

---

<sup>9</sup> Edmundus Pareira, "Seputar Warisan Adat Kabupaten Sikka" (Manuskrip, 1991), hlm. 5.

<sup>10</sup> *Ibid.*, hlm. 6.

Tahap kedua ialah masa perkawinan. Masa perkawinan ini terdiri atas 12 tahap. *Hakeng kawit* ialah penentuan tanggal pernikahan, *a wija* ialah perjamuan oleh pihak keluarga lelaki untuk mengumpulkan mas kawin, *wake unu* ialah permulaan pesta pernikahan yang digelar sehari sebelum pernikahan. Kemudian pada hari pernikahan; orang tua wanita menerima calon pengantin pria, diserahkannya kepada *A'a gete* untuk *plaha 'oha sorong loni* yang artinya membentang tikar dan bantal. Tahap berikutnya ialah pernikahan gereja katolik; kedua mempelai menerima sakramen pernikahan di gereja. Kemudian *'ea gae'r* ialah perjamuan bersama pada malam harinya, *tama ola uneng* ialah pengantin memasuki pelaminan pertama kali dilakukan dengan upacara, *Wehak Bunga* ialah penaburan bunga kepada kedua pengantin yang baru saja mengalami malam pertama, *tung temang* yakni pihak wanita menghantar bahan-bahan *tung temang* ke rumah pihak pria, *tung balik* ialah menurut kebiasaan mas kawin sudah harus diberikan oleh pihak lelaki setelah hari perkawinan bila *tung temang* telah dihantar juga oleh pihak wanita. Kemudian *hu'i* yakni pengantin mandi setelah empat malam pertamanya, *tung lako* yakni keluarga pria datang membawa makanan untuk menjenguk pengantin. *Ngoro Remang* merupakan tahap terakhir yakni membongkar dapur sementara yang dibuat saat pesta pernikahan.<sup>11</sup>

Namun ada juga perkawinan yang terjadi di luar dari prosedur yang terdiri atas kawin masuk, kawin lari, ganti tikar dan *woter la'i*. Disini penulis membatasi diri dengan memberi fokus pada budaya *woter la'i*. *Woter la'i* merupakan suatu budaya mencari suami pengganti bagi seorang perempuan yang memiliki hubungan terlarang dengan laki-laki yang sudah berkeluarga atau dengan laki-laki yang masih memiliki hubungan darah dekat dengannya.<sup>12</sup>

Sejatinya, kebudayaan dibentuk dalam sejarah dan bergerak dalam kodrat alamiah manusia, namun dikembangkan terus-menerus sesuai dengan tuntutan kemanusiaan. Dalam mewujudkan itu, akal budi, keinginan, pengetahuan, kebebasan dan praksis serta sejarah menjadi elemen dasar dalam upaya mengungkapkan dan

---

<sup>11</sup> M. Mandalangi Pareira, "Adat Istiadat Sikka Krowe di Kabupaten Sikka" (Manuskrip, 1988), hlm. 12-23.

<sup>12</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Elias Raja, Tokoh Adat, Desa Egon Gahar, pada 9 Juli 2022 di Lere.

merealisasikan hakikat kemanusiaan terus-menerus. Karena itu Ernest Cassirer mengatakan “kebudayaan adalah sebuah proses belajar”.<sup>13</sup> Kita tidak dapat memungkiri bahwa budaya membawa nilai-nilai yang memanusiakan manusia dan membawa banyak dampak positif dalam rangka penyelenggaraan hidup bersama. Budaya menciptakan keteraturan sosial. Budaya memperjuangkan nilai kemanusiaan universal. Budaya membantu menyelesaikan banyak masalah sosial. Budaya membantu menjaga relasi antara individu, keluarga dan kelompok masyarakat. Kenyataan-kenyataan ini mengisyaratkan bahwa budaya merupakan komponen yang penting dalam hidup manusia. Namun demikian, tentunya budaya juga mesti selalu terbuka terhadap analisa-analisa baru. Ada budaya-budaya tertentu yang sangat baik secara ideal namun bertendensi negatif secara praktis. Ada juga budaya yang baik tetapi kemudian ditunggangi dengan kepentingan tertentu hingga membawa dampak buruk tertentu. Ada juga budaya yang kurang dikritisi sehingga sulit diberi penilaian secara negatif sebab nilai negatif terselubung dalam idealisme positif.

Hemat penulis, budaya dibuat oleh manusia dan oleh sebab itu mestinya dapat dikritisi dan dipikirkan kembali. Kita sekarang hidup di zaman yang modern. Perkembangan teknologi maupun intelektual yang semakin pesat membuat kita perlu berpikir maju dan bersikap kritis serta selektif. Kita tidak harus menerima begitu saja budaya-budaya yang diwariskan secara turun-temurun. Kita perlu menyesuaikannya dengan perkembangan yang ada. Nilai-nilai budaya tersebut perlu dipikirkan kembali dalam paradigma yang baru. Merujuk pada kerangka berpikir ini, hemat penulis, budaya *woter la'i* di Desa Egon Gahar merupakan sebuah budaya yang layak dianalisa secara kritis.

Oleh karena itu, penulis merasa terdorong untuk menggarap sebuah karya tulis dengan judul **Budaya *Woter La'i* di Desa Egon Gahar: Sebuah Analisis**.

---

<sup>13</sup> Kasdin Sihotang, *Filsafat Manusia* (Yogyakarta: PT Kanisius, 2018), hlm. 141.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, rumusan masalah utama dalam skripsi ini ialah bagaimana budaya *woter la'i* di Desa Egon Gahar dan analisis kritis terhadapnya ? Rumusan masalah utama ini dijabarkan dalam dua sub masalah antara lain: pertama, apa itu budaya *woter la'i* di Desa Egon Gahar? Kedua, bagaimana analisis kritis terhadap budaya *woter la'i* di Desa Egon Gahar?

## **1.3 Tujuan Penulisan**

Tujuan penulisan karya ilmiah ini ialah penulis menjelaskan dan menganalisis budaya *woter la'i* di Desa Egon Gahar? Selain itu tujuan dari penulisan karya ilmiah ini ialah untuk memenuhi salah satu syarat menjadi sarjana strata satu (S1) filsafat di Institut Filsafat dan Teknologi Kreatif Ledalero.

## **1.4 Metode Penulisan**

Dalam upaya membahas tema ini, penulis menggunakan metode penelitian kualitatif. Penulis melakukan kajian pustaka. Penulis juga melakukan wawancara dengan beberapa tokoh adat dan tokoh masyarakat di Desa Egon Gahar. Melalui studi pustaka dan wawancara tersebut, penulis kemudian membuat analisis secara kritis budaya *woter la'i* di Desa Egon Gahar.

## **1.5 Sistematika Penulisan**

Tulisan ini terbagi ke dalam lima bab. Bab 1 merupakan pendahuluan. Dalam bab satu ini penulis menjelaskan latar belakang penulisan, rumusan masalah, tujuan penulisan, metode penulisan dan sistematika penulisan.

Dalam Bab II, penulis membahas secara terperinci tentang budaya *woter la'i* di Desa Egon Gahar. Penulis membaginya dalam beberapa bagian pembahasan: latar belakang dan konteks kehidupan masyarakat Desa Egon Gahar, sistem perkawinan di Desa Egon Gahar serta budaya *woter la'i*.

Dalam Bab III, penulis membuat sebuah analisa kritis terhadap budaya *woter la'i* di Desa Egon Gahar. Dalam menjelaskan hasil analisa ini, penulis pertama-tama menjelaskan tentang budaya *woter la'i* sebagai sebuah nilai. Setelah itu, penulis akan menjelaskan hasil analisa yang menyatakan budaya *woter la'i* sebagai produk patriarkat yang melanggengkan kekuasaan laki-laki, degradasi nilai perkawinan, pengobjekan terhadap kaum perempuan, dan sebagai solusi yang tidak solutif.

Akhirnya dalam Bab IV yang merupakan bagian penutup, penulis memberikan kesimpulan terhadap keseluruhan penulisan. Penulis juga memberikan rekomendasi bagi kaum perempuan, bagi kaum laki-laki, bagi lembaga masyarakat, bagi lembaga pemerintah serta bagi gereja mengenai bagaimana menyikapi budaya *woter la'i*.